

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Upaya

2.1.1.1 Konsep Upaya

KBBI menyatakan bahwa upaya merupakan tindakan untuk tercapainya suatu tujuan dan maksud dalam memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Dalam artian ini, upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu yang memiliki manfaat baik itu dengan solusi, ide ide dan lainnya dengan melakukannya secara sungguh sungguh agar mendapatkan hasil yang maksimal. Upaya yang diartikan oleh Torsina (1987) dalam Teguh (2018, hlm. 33) yaitu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Poerwadarminta (1991, hlm. 1344) “Upaya merupakan usaha untuk menyalurkan maksud, ikhtisar dan akal. Jadi, upaya merupakan suatu hal agar tujuan dapat lebih berguna dan berhasil sesuai dengan yang telah direncanakan”. Adapun Surayin (2001, hlm. 665) dalam Muhaiyat mengartikan bahwa upaya adalah usaha; akal; ikhtiar untuk mencapai suatu maksud. Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa mencari jalan keluarnya. Upaya sangat berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam menopang kegiatan yang dijalankan. Agar kegiatan tersebut berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya. Upaya juga berkaitan tentang hal yang dilakui oleh individu ataupun kelompok agar memiliki manfaat dan dampak untuk masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis dapat simpulkan pengertian dari upaya. Upaya merupakan sebagai kegiatan atau usaha mencapai suatu yang dimaksud agar mencegah sesuatu yang tidak diperlukan atau mengganggu untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi seseorang ataupun orang banyak.

2.1.2 Pemberdayaan

2.1.2.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) dapat diartikan sebuah proses perubahan. Secara konsep, kata pemberdayaan dalam Bahasa Inggris yaitu '*power*' yakni kekuasaan atau keberdayaan. Sedangkan kata pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata 'daya' yang berarti tenaga atau kekuatan. Lalu ditambahkan awalan 'ber' menjadi berdaya yang artinya mempunyai tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memotivasi, mendorong, dan mengembangkan kesadaran dari potensi yang dimiliki untuk menjadikan potensi tersebut menjadi nyata. Menurut Chambers dalam Noor (2011, hlm. 88) pemberdayaan yakni hal yang digunakan ketika pembangunan ekonomi, tetapi didalamnya terdapat nilai nilai social.

Adams (2003) mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupakan cara yang dipergunakan perorangan, kelompok ataupun komunitas agar dapat mengelola lingkungan, menggapai tujuannya sehingga dapat saling membantu memaksimalkan kualitas hidup (Sany, 2019 hlm. 34).

Konsep pemberdayaan menurut Theresia (2014, hlm. 115) yaitu mendukung terbentuknya kemandirian masyarakat. Theresia mengkategorikan pemberdayaan dalam beberapa aspek yaitu lebih meningkatnya prakarsa dan swadaya masyarakat, lingkungan sekitar dan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pemberdayaan pada hakekatnya tidak dilakukan secara individu, namun dilakukan secara kelompok sebagai bentuk eksistensi manusia. Menurut Craig dan Mayo dalam Alfitri (2011, hlm. 22) hal paling pokok dalam upaya dan proses pemberdayaan adalah partisipasi, saat ini strategi pemberdayaan mendudukan partisipasi masyarakat merupakan isu utama pembanguna. Pemberdayaan sangat erat dengan pembangunan, untuk itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan

sangatlah diperlukan karena objek dan subjek pembangunan adalah masyarakat itu sendiri.

Beberapa arti dari pemberdayaan di atas, maka penulis menyimpulkan arti dari pemberdayaan yakni sebuah proses untuk melakukan perubahan pembangunan yang dilakukan secara berkelompok agar mencapai kehidupan yang lebih baik dari segi kapasitas diri maupun dari lingkungan sekitar. Pemberdayaan juga dilakukan terkhusus untuk kelompok yang lemah atau tidak berdaya.

2.1.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan yang didasari UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yakni : “Tujuan pemberdayaan masyarakat yakni meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan swadaya masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.” Adapun menurut Suharto (2010, hlm. 60) tujuan utama dari pemberdayaan yakni menguatkan kelompok masyarakat yang lemah atau tidak berdaya. Pemberdayaan adalah salah satu kegiatan yang perlu dilakukan dengan upaya untuk memberdayakan, terkhusus bagi kelompok lemah atau tidak berdaya. Suharto (2010, hlm. 60) mengidentifikasi kelompok lemah dan tidak berdaya, yaitu :

- a. Lemah struktural, yaitu kelompok lemah yang dilihat dari kelas atau tingkat ekonomi, gender sampai dengan etnis.
- b. Lemah khusus, contoh kelompok lemah khusus yaitu manula, remaja berkebutuhan khusus, anak - anak, dan masyarakat yang terasingkan.
- c. Lemah personal, yaitu yang memiliki masalah pada dirinya atau masalah dengan keluarganya.

Terdapat pernyataan dari Sennet dan Cabb dalam Suharto (2010, hlm. 209) bahwa ketidakberdayaan disebabkan dari beberapa faktor yaitu jaminan ekonomi,

akses terhadap informasi, dukungan finansial, pelatihan, dukungan fisik ataupun emosional. Utamanya, pemberdayaan memiliki tujuan yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat, terkhusus kelompok yang lemah atau tidak berdaya dan tujuan pemberdayaan juga untuk menciptakan masyarakat menjadi mandiri. Mandiri yang dimaksud yakni kemandirian ketika berpikir, ketika bertindak ataupun mengendalikan hal yang telah dilakukan. Payne mengungkapkan bahwa suatu proses pemberdayaan pada utamanya bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat mengambil keputusannya sendiri dengan meningkatkan rasa percaya diri (Adi, 2013, hlm. 77).

2.1.2.3 Indikator Pemberdayaan

Indikator dalam pemberdayaan perlu diketahui agar dapat menunjukkan apakah seseorang berdaya atau tidak berdaya. Hal ini dikarenakan agar program pemberdayaan yang dijalankan dapat dilakukan secara optimal. Menurut Soemodiningrat (2009, hlm. 129) terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing masing indikator :

- a. *Enabling*, yang berarti membuat suasana yang mendukung untuk masyarakat mengembangkan potensinya. Pada setiap individu pasti memiliki potensi, namun dengan tidak adanya motivasi atau karena ada keterbatasan dalam individu maka potensi itu tidak akan bisa berkembang, maka diperlukanlah indikator ini yaitu *enabling*.
- b. *Empowering*, yang berarti menguatkan daya tarik dan potensi yang ada di sekitar dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Umumnya indikator ini menjurus pada bidang pendidikan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan sarana dan prasarana, dan juga layanan dasar yang masyarakat butuhkan.
- c. *Protecting*, yang dapat diartikan memberi perlindungan untuk masyarakat minoritas atau kelompok kelompok yang lemah. Untuk menjamin jika

masyarakat minoritas dan mayoritas dapat berkontribusi dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan lainnya tanpa takut tidak diberikan kesempatan untuk terlibat.

2.1.2.4 Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan terdapat 4 (empat) yakni :

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini merupakan prinsip yang utama dalam proses pemberdayaan yakni dengan terdapatnya kesetaraan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan, dengan tidak melihat gender baik itu laki laki atau perempuan. Tujuan yang dibangun yaitu untuk mengembangkan berbagai pengetahuan dan keahlian satu dengan lainnya, yang menjadikan masyarakat dan lembaga yang melakukan proses pemberdayaan menjadi proses saling belajar.

b. Prinsip Partisipasi

Hal ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan, antara kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan untuk melaksanakan program program yang telah dirancang. Program program pemberdayaan yang bisa mendorong kemandirian masyarakat yakni yang sifatnya partisipatif, dilaksanakan, dipencanaanakan, diawasi dan dievaluasi masyarakat. Namun memerlukan proses yang tidak mudah.

c. Prinsip Keswadayan atau Kemandirian

Prinsip ini menghargai dan mementingkan kecakapan masyarakat dari pihak lain. Tidak memandang masyarakat dari status dan kemampuan yang sedikit. Tetapi melihat dari kemampuan masyarakat yang ingin berusaha karena itu merupakan modal dasar dalam proses pemberdayaan

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan diharuskan dirancang secara berkelanjutan, walaupun pada awal pelaksana program lebih dominan, tetapi secara perlahan masyarakat mampu mengelola kegiatan pemberdayaan dengan sendirinya. (Najiyati, et al.,2014, hlm. 26)

Menurut Dahana dan Bhatnagar (1980) dalam Haris (2014, hlm. 53) menyebutkan jika ada 6 (enam) prinsip yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemberdayaan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Partisipasi dan Kerjasama. Hal ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan, antara kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan untuk melaksanakan program program yang telah dirancang.
- b. Metode yang tepat. Metode tepat yang dimaksud yaitu metode yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Demokratis. Maksud dari demokratis yaitu kegiatan pemberdayaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengambil keputusan termasuk kepada metode yang akan digunakan nantinya.
- d. Minat dan kebutuhan. Yaitu jika melihat dari minat dan yang dibutuhkan masyarakat, maka pemberdayaan akan lebih efisien dan efektif.
- e. Perubahan budaya. Artinya kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara bijak dan hati - hati agar menghindari terjadinya perubahan budaya yang menimbulkan kejutan budaya di masyarakat.
- f. Kelompok masyarakat bawah. Maksud dari kelompok masyarakat bawah yaitu kegiatan pemberdayaan akan lebih efektif dan efisien jika mampu melibatkan kelompok masyarakat bawah yang berada dekat dengan masyarakat.

Pemberdayaan haruslah mengarah pada pembentukan 4 (empat) aspek masyarakat. Aspek tersebut yaitu kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik.

Kondisi kognitif merupakan kemampuan saat berpikir yang didasari oleh pengetahuan dan wawasan individu atau masyarakat dalam mencari solusi permasalahan yang terjadi. Kondisi konatif merupakan sikap atau perilaku yang sensitif terhadap pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah pemikiran masyarakat untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Sedangkan kemampuan psikomotorik yaitu kecakapan yang dimiliki masyarakat untuk mendukung dalam kegiatan pembangunan. Dengan adanya ke empat aspek ini dapat memberikan kontribusi terciptanya kemandirian masyarakat.

2.1.2.5 Tahapan Pemberdayaan

Dalam kegiatan pemberdayaan pastinya melakukan tahapan tahapan untuk mencapai target yaitu menjadikan masyarakat mandiri, tahapan pemberdayaan menurut Adi (2013, hlm. 64). Terdapat 7 (tujuh) yakni sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, dalam terdapat dua hal yang perlu dipersiapkan yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Petugas dimaksudkan untuk orang yang melaksanakan tugas pemberdayaan sesuai dengan bidangnya dan orang yang berkompeten yang disiapkan untuk pemberdayaan ini. Kemudian persiapan lapangan sangat berkaitan dengan tempat, subjek dan objek untuk melaksanakan pemberdayaan.
- b. Tahap pengkajian, tahapan ini berfokus untuk mengidentifikasi permasalahan dan juga mengkaji sumber daya yang ada disekitar. Dalam tahapan ini sangat dibutuhkan peran aktif dari masyarakat agar tepat sasaran pemberdayaannya
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, yaitu tahapan ketika petugas pemberdayaan mencoba melibatkan warga untuk memikirkan apa permasalahan yang dihadapinya dan bagaimana solusi untuk mengatasinya.
- d. Tahap pemfomalisasi perencanaan aksi, petugas pemberdayaan membantu masing masing kelompok untuk merancang dan menentukan program yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahan masyarakat. Kemudian

petugas pemberdayaan juga membantu menuliskan gagasan dan ide untuk pembuatan proposal kepada penyandang dana

- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan, pada tahap ini merupakan tahap pengimplementasian dari apa yang telah dirumuskan bersama. Dalam tahapan ini diperlukan kerjasama antara petugas dan masyarakat agar sesuai dengan tujuan awal.
- f. Tahap evaluasi, tahapan ini merupakan proses pengawasan program atau kegiatan yang telah dijalankan dari masyarakat dan petugas pemberdayaan.
- g. Tahap terminasi, tahap ini merupakan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat. Hal ini dilakukan jika masyarakat telah mandiri setelah pelaksanaan pemberdayaan tersebut.

2.1.3 Anak Jalanan

2.1.3.1 Konsep Anak Jalanan

United Nation Children's Fund (UNICEF) dalam Amal (2003, hlm. 32) mengartikan definisi dari anak jalanan merupakan anak-anak yang berumur di bawah 16 tahun yang telah lepas dari keluarganya, pendidikan, dan lingkungan masyarakat terdekat, yang kehidupannya berpindah-pindah di jalan raya. Anak-anak jalanan ini muncul di kota kota besar, yang menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh sekaligus mencari nafkah. Dalam mencari nafkah, anak jalanan ada yang bekerja atas kemauan diri sendiri dan ada juga anak yang dipaksa untuk bekerja di jalanan oleh orang jahat di sekitar atau yang biasa disebut eksploitasi anak.

Terry E. Lawson dalam Nihayah (2016, hlm. 9) mengungkapkan arti dari eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif kepada anak yang dilakukan oleh masyarakat atau dari keluarga anak tersebut. Ada 4 (empat) macam eksploitasi anak jalanan menurut Lawson menggunakan definisi *child abuse*. Macam macam *child abuse* tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Kekerasan emosional (*emotional abuse*) yakni ketika anak diabaikan perhatiannya oleh orang tua, orang yang mengasuh, ataupun pelindung anak walaupun anak tersebut telah meminta perhatiannya.
- b. Kekerasan verbal (*verbal abuse*) yakni kekerasan yang berupa hinaan kepada anak ataupun kata yang melukai anak.
- c. Kekerasan fisik (*physical abuse*) yakni kekerasan yang terjadi jika orang tua, orang yang mengasuh ataupun pelindung anak melakukan kekerasan secara fisik yang berkontak langsung dengan tubuh anak
- d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) yakni anak dipaksa berhubungan seksual dengan seseorang yang menetap dekat di kehidupannya.

Menurut Suyanto (2010, hlm. 185) anak jalanan sudah berhadapan dengan lingkungan keras, tidak bersahabat dan harus bertahan hidup sejak dini, tidak sedikit dari anak jalanan tersebut yang dikatakan sebagai pengganggu ketertiban karena dianggap tidak sesuai dengan norma umum yang berjalan. Dalam menjalani hidup, menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan. Dimana harus menghadapi kehidupan jalanan yang keras. Seharusnya anak jalanan berada di lingkungan belajar, bermain dan berkembang. Keberadaan anak jalanan tahun demi tahun selalu mengalami peningkatan, dimana kondisi ini sangat memprihatinkan.

2.1.3.2 Kelompok Anak Jalanan

Menurut Surbakti dalam Suyanto & Hariadi (2002, hlm. 41), berdasarkan hubungan anak dengan orangtuanya, anak jalanan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni sebagai berikut:

- a. *Children of the Street* atau anak yang putus hubungan dengan orangtuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan. Dimana seluruh waktu anak ini dihabiskan di jalanan. Ciri ciri dari anak jalanan ini yaitu bekerja dan tinggal di jalanan, tidak mempunyai rumah bahkan tidak kontak dengan keluarganya. Biasanya berasal dari keluarga yang memiliki konflik dari perceraian hingga penyiksaan orang tuanya.

- b. *Children on the Street* atau anak yang masih memiliki hubungan dengan keluarganya dan tidak bersekolah. Ada dua kategori dalam kelompok ini yaitu anak-anak jalanan yang masih tinggal dengan orang tua nya bahkan pulang ke rumah setiap hari dan anak jalanan yang biasanya kembali ke orang tuanya dalam seminggu sekali atau bahkan tiga bulan sekali. Fungsi anak jalanan ini untuk membantu ekonomi keluarganya dari kemiskinan yang sebagian penghasilan akan dibagikan kepada keluarganya.
- c. *Children From Families Of The Street* atau anak jalanan yang keluarganya memang di jalanan. Dimana anak jalanan tersebut menghabiskan seluruh waktunya di jalanan, mengais rezeki dan tinggalnya pun di jalanan.

2.1.3.3 Tingkatan Anak Jalanan

Menurut Surjana dalam Astri (2014, hlm. 150) faktor yang menyebabkan anak-anak hidup di jalanan terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, tingkatan tersebut yaitu :

a. Tingkat Mikro (*Immediate Causes*)

Tingkat mikro ini disebabkan dari anak itu sendiri ataupun juga dari keluarganya. Contoh penyebab anak turun ke jalanan yaitu lari dari rumah dikarenakan orang tua terbiasa menggunakan kekerasan di rumah seperti dipukul, dianiaya, dll. Kemudian hal lain yaitu anak diharuskan bekerja karena keterbatasan nya ekonomi keluarga, baik anak itu diharuskan bekerja setelah sekolah atau bahkan sampai putus sekolah. Penyebab berasal dari keluarga yaitu penelantaran, seperti orang tua tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar, mengalami kekerasan di rumah dan juga sulit berhubungan dengan keluarga karena terpisah. Hal hal ini baik faktor dari anak maupun orangtua akan terkait satu sama lain.

b. Tingkat Messo (*Underlying Causes*)

Tingkat meso ini dilatar belakangi dari faktor lingkungan sekitar. Seperti pada masyarakat miskin yang berfikir lebih bahwa anak adalah aset, kemudian anak-anak dipengaruhi dan diajarkan untuk bekerja sampai ke kota orang hingga berakhir di jalanan. Adapun faktor lingkungan dari teman-temannya untuk ikut turun ke

jalanan, baik itu teman di dekat tempat tinggalnya ataupun teman sekolahnya. Keterpengaruhannya ini akan semakin tinggi bila pihak dari keluarga dan komunitas sekitar tidak peduli dengan keberadaan anak jalanan karena tidak adanya pencegahan. Selain dari faktor teman, adapun dari kebiasaan mengajarkan bekerja sehingga suatu saat menjadi penyebab untuk meninggalkan sekolah dan turun ke jalanan.

c. Tingkat Makro (*Basic Causes*)

Faktor faktor munculnya anak jalanan pada tingkat makro yaitu sebagai berikut :

- 1) Ekonomi, dengan adanya peluang pekerjaan di jalanan yang tidak terlalu membutuhkan keahlian. Tidak sedikit yang bermigrasi dari desa ke kota untuk mencari kerja dan dari sebagian hal tersebut menjadi terlantar. Ini mengakibatkan anak-anak akan berada di jalanan.
- 2) Penggusuran, hal ini juga menjadi salah satu faktor karena dengan digusurnya rumah maka bisa menjadi penyebab anak-anak terlempar ke jalanan.
- 3) Pendidikan, dengan biaya sekolah yang tinggi dan beberapa ketentuan teknis yang menghilangkan kesempatan belajar. Dapat meningkatkan anak putus sekolah dan mencari pekerjaan di jalanan untuk mendapatkan tambahan uang untuk keluarga.

Banyak permasalahan yang bisa ditemui oleh anak jalanan, permasalahan tersebut tentunya akan terjadi jika anak jalanan sering melakukan kehidupan di jalanan. Menurut Moeliono dan Dananto (2007, hlm 40) ada beberapa masalah anak jalanan berdasarkan dengan siapa yang berhubungan dengan anak jalanan. Dimulai dari anak jalanan bertemu dengan anak jalanan lain, menjadi sosok yang bebas, tidak ada pantauan dari orangtua, bebas jajan, dan lainnya. Hal ini menjadi motivasi anak-anak lain untuk mengikuti menjadi anak jalanan ini. Kemudian kekerasan antar anak jalanan seperti perkelahian, bahkan sampai menggunakan senjata tajam. Ini dapat berpengaruh ke trauma anak tersebut. Permasalahan yang kedua yaitu anak jalanan dengan orangtua, dimana tidak sedikit anak jalanan yang dipaksa

bekerja oleh orang tua nya untuk menambah ekonomi orang tuanya. Permasalahan yang ketiga yaitu anak jalanan dengan masyarakat. Anak jalanan dianggap pengganggu kenyamanan lingkungan yang menjadikan anak jalanan menjadi stigma buruk bagi masyarakat. Padahal, tidak semua anak jalanan berwatak buruk tidak sedikit juga yang berusaha hidup secara halal dengan menyemir sepatu, menjual asongan bahkan menjadi buruh atau kuli.

Anak jalanan seharusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga lembaga. Karena pada umumnya, hak hak anak dijamin dan dilindungi agar menjadikan anak jalanan menjadi orang yang bermanfaat dan mempunyai masa depan yang cerah sebagaimana anak pada umumnya. Dari Pasal 34 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh Negara”. Dapat diartikan pemerintah mendapatkan tanggung jawab atas pembinaan anak-anak yang terlantar.

Pada hakekatnya, hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, tercantum dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Beberapa hak anak antara lain ; hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta perlindungan khusus.

Sedangkan hak hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (2) anak berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- b. Mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tua yang sesuai kemampuan, bakat dan minatnya

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

2.1.4 Pemberdayaan Anak Jalanan

2.1.4.1 Pendekatan Pemberdayaan Anak Jalanan

Menurut Lusk terdapat 3 (tiga) dalam Anandar & Wibowo (2015, hlm. 144) pendekatan rumah singgah dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan. Ketiga pendekatan itu yakni *street based*, *community based* dan *centre based*. Berikut adalah penjelasan dari masing - masing pendekatan:

- a. *Street based*, merupakan pendekatan yang dilakukan langsung di jalanan oleh fasilitator. Fasilitator dalam pendekatan ini biasa disebut dengan *street educator*. Para *street educator* melakukan pendekatan dengan mengajak anak-anak jalanan berinteraksi seperti layaknya teman. Anak-anak jalanan yang mendapatkan pendekatan ini biasanya anak yang sudah sulit berhubungan dengan keluarganya, sampai yang sudah putus hubungan dengan keluarganya. *Street educator* disini berperan sebagai pengganti keluarga para anak jalanan tersebut.
- b. *Community based*, merupakan pendekatan yang membutuhkan seluruh lapisan masyarakat, seperti keluarga maupun orangtua. Pendekatan ini berfokus untuk mencegah anak-anak terjun ke jalanan. Kegiatan yang dilakukan pada pendekatan ini biasanya berupa penyuluhan kepada keluarga, kesempatan anak untuk mendapat pendidikan formal maupun informal, dan kegiatan lainnya.
- c. *Centre based*, merupakan pendekatan anak jalanan yang dilakukan di panti atau rumah singgah. Dalam pendekatan ini, anak jalanan akan diberikan layanan berupa makanan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan kegiatan lainnya yang membantu anak jalanan mengembangkan kemampuannya.

2.1.4.2 Proses Pemberdayaan terhadap Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1999) berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah, ada beberapa proses dan tahapan yang terbagi menjadi 5 (lima) yakni berikut:

a. Penjangkauan (*outreach*)

Proses ini dilakukan pelaksana rumah singgah dengan turun ke jalanan untuk melakukan kontak, bertemu dan berkenalan dengan anak-anak jalanan yang menjadi sasaran. Lalu, proses ini dilanjutkan dengan kontrak antara pelaksana dengan anak-anak jalanan.

b. Penilaian (*Assesment*)

Proses ini yakni mengkaji dan mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan juga sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memberdayakan anak jalanan. Proses ini melakukan pendekatan baik itu perorangan ataupun kelompok agar dapat mengenal lebih dekat.

c. Perencanaan Pelayanan (*Planning*)

Proses ini dilakukan dengan melakukan perundingan dan pengumpulan ide-ide program pemberdayaan anak jalanan dilihat dari data yang didapat dari proses *assesment* sebelumnya. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang spesifik terhadap anak jalanan kedepannya.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan yakni proses mengeksekusi perencanaan yang sebelumnya telah dirancang. Baik itu konsep, ide, ataupun gagasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi dalam proses pelaksanaannya, evaluasi tidak dapat dilakukan jika tidak ada monitoring, dan begitupun sebaliknya. Monitoring dapat diartikan sebagai pemantauan, yakni mengamati keadaan ketika kegiatan sedang berlangsung. Sedangkan pengertian

dari evaluasi yakni penilaian yang dilakukan ketika kegiatan telah berakhir atau kegiatan telah berjalan setelah beberapa saat (satu bulan, tiga bulan, satu tahun, dan seterusnya).

f. Terminasi

Proses terminasi merupakan proses pengakhiran kegiatan antara pelaksana dengan anak. Hal ini bisa disebabkan dari beberapa hal, hal tersebut seperti anak jalanan telah kembali kepada keluarganya, anak jalanan mendapat rujukan ke lembaga atau Rumah Singgah lain, anak jalanan mendapatkan pekerjaan yang layak, anak jalanan telah selesai mengikuti kegiatan dari Rumah Singgah, dan anak jalanan yang pergi dari Rumah Singgah tanpa berkabar. (Amin, 2014, hlm. 184)

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan dari beberapa penelitian ataupun skripsi yang memiliki hubungan dengan judul dan topik penelitian yang penulis lakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah penelitian yang penulis kaji sesuai dengan masalah dan topik pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 2.2.1 Penelitian yang disusun oleh Husnul Khotimah dengan judul “Peran Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Anak Jalanan di Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilaksanakan oleh Yayasan Bina Anak Pertiwi dalam mengentaskan kemiskinan anak-anak jalanan melalui berbagai program. Program tersebut seperti membuat kelompok belajar yakni paket A, B, dan C kemudian juga terdapat program sekolah formal untuk anak-anak yang serius belajar dan memiliki prestasi. Yayasan Bina Anak Pertiwi melakukan program-program ini karena salah satu faktor yang menjadikan anak jalanan dapat terjun ke jalan adalah masalah kemiskinan. Hal ini

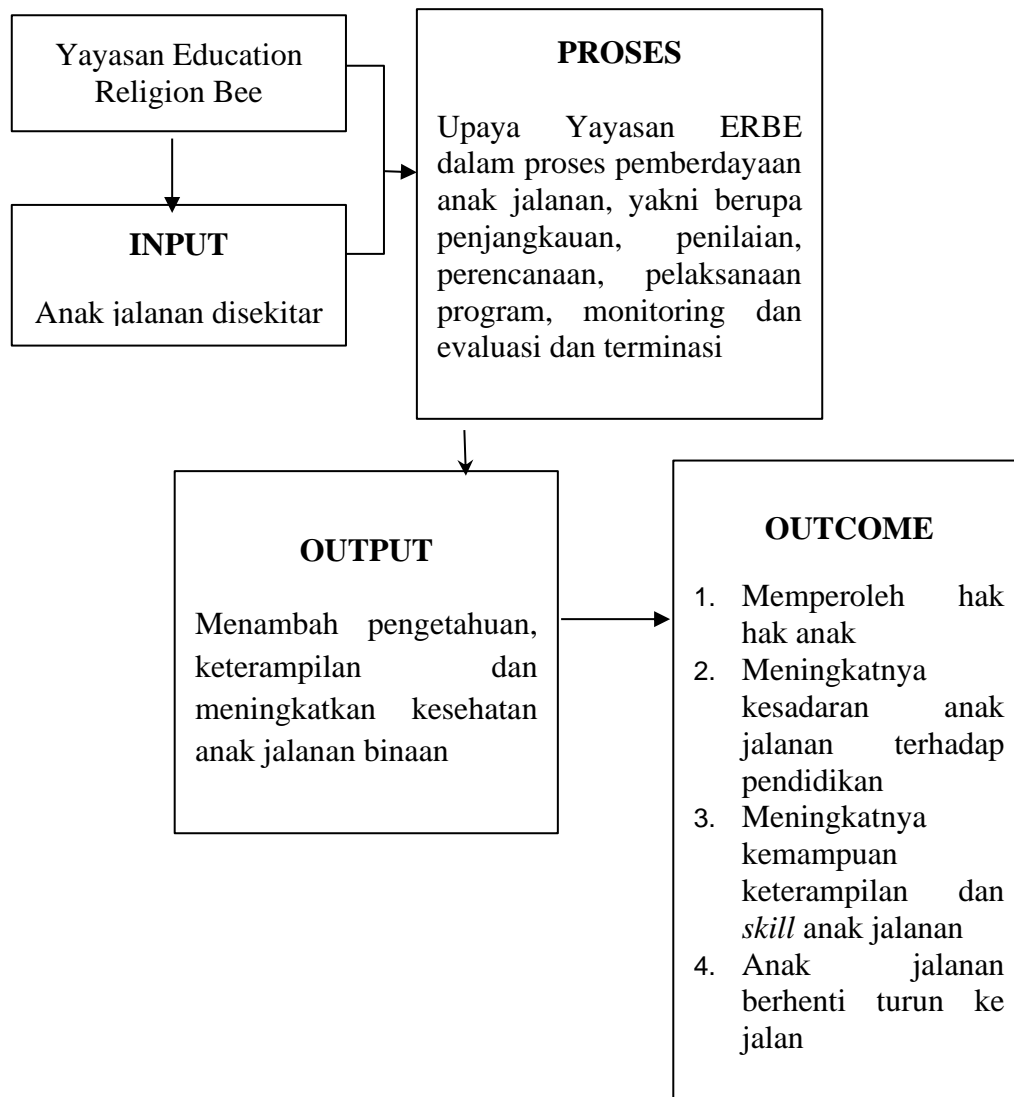
setidaknya dapat diatasi melalui program program di Yayasan Bina Anak Pertiwi.

- 2.2.2 Penelitian yang disusun oleh Maria Sundari dengan judul penelitian “Bimbingan Keagamaan bagi Anak Jalanan di Rumah Singgah Al Ma’un Kota Bengkulu”. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan dan faktor penghambat juga pendukung dari bimbingan keagamaan di Rumah Singgah Al Ma’un. Hasil penelitian ini yakni banyak kegiatan bimbingan yang telah dilaksanakan di Rumah Singgah Al Ma’un untuk anak jalanan seperti bimbingan akhlak dan juga bimbingan keagamaan. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari internal dan juga eksternal.
- 2.2.3 Penelitian yang disusun oleh Bayu Segara dengan judul penelitian yakni “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Mataram”. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus tentang peran yang dilakukan dinas sosial setempat dalam menanggulangi anak jalanan dan juga faktor penghambat dinas sosial dalam menanggulangi anak jalanan. Hasil penelitian ini yakni ada berbagai bentuk upaya yang dilakukan dinas sosial setempat, seperti pendataan, pembinaan pencegahan dan upaya rehabilitasi sosial untuk anak jalanan. Kemudian adapun berbagai faktor penghambat yang ditemukan ketika melaksanakan penanggulangan anak jalanan, seperti sulitnya menerima informasi anak jalanan, anak jalanan tidak merasa jera walaupun sudah direhabilitasi, dan permasalahan lainnya.
- 2.2.4 Penelitian yang disusun oleh Maya Awalani dengan judul penelitian yaitu “Peran Yayasan Terang Anak Indonesia dalam Membantu Kebutuhan Pendidikan Anak Jalanan Bersekolah di Era COVID-19”. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan peran yayasan dalam membantu kebutuhan pendidikan anak jalanan di era Covid-19. Peranan yang dilakukan yayasan ini yakni melaksanakan program yang dinamakan “Sekolah *Online* Bersama YATERI” berguna untuk memberikan layanan kesejahteraan untuk anak jalanan yakni membantu melengkapi ataupun menggantikan peran orang tua nya yang tidak mampu melakukan tugasnya dalam pendidikan anak selama era Covid-19. Pembelajaran ini dilakukan secara daring atau harus menggunakan *gadget* yang merupakan salah satu tantangan dalam program yang dijalankan ini.

- 2.2.5 Penelitian yang berjudul “Tahapan Pelayanan Anak Jalanan” disusun oleh Resti Mirza Apriani ini berisi tentang tahapan pelayanan anak jalanan di Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM) dan menggambarkan sumber pendukung pelayanan anak jalanan di yayasan ini. YABIM merupakan sebuah lembaga yang terkhusus kepada anak jalanan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana membangun data dan pola yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, yakni terdapat beberapa tahapan seperti tahap masuk yayasan, tahap persiapan penerimaan kegiatan, tahap proses pelayanan, dan tahap pengakhiran pelayanan. Tidak lupa juga terdapat faktor pendukung pelayanan ini yakni dukungan dari Sumber Daya Manusia dan dari administrasi pelayanan sosial.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka pertanyaan penelitian yang didapat yaitu: Bagaimana upaya Yayasan Education Religion Bee Entertainment (ERBE) dalam proses pemberdayaan anak jalanan?